



**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Achmad Tahir

NIM 130810101051

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Achmad Tahir

NIM 130810101051

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

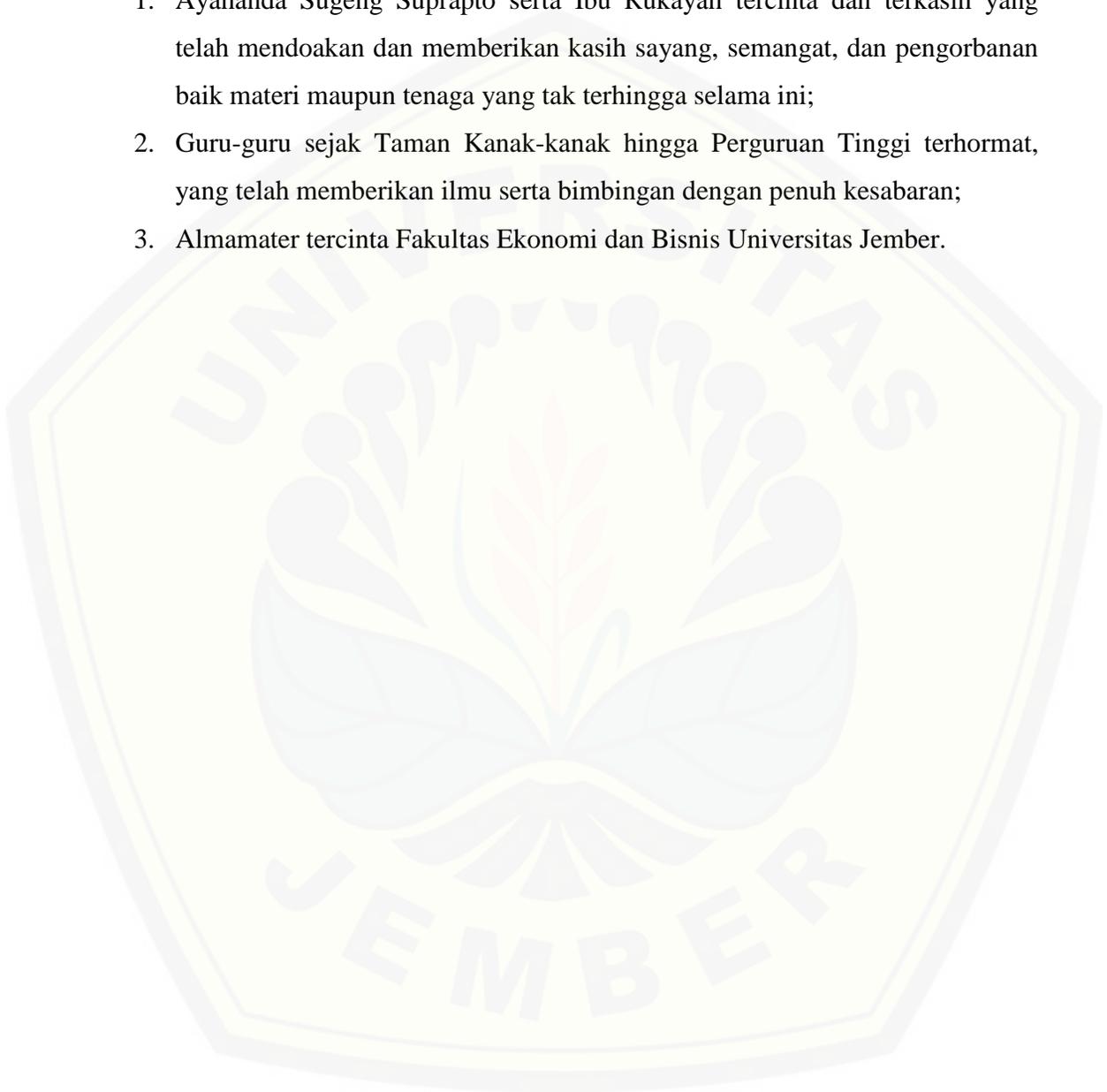
UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada ;

1. Ayahanda Sugeng Suprpto serta Ibu Rukayah tercinta dan terkasih yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat, dan pengorbanan baik materi maupun tenaga yang tak terhingga selama ini;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

Masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini.
(Mahatma Gandhi)

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha disertai dengan
doa,
karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan
sendirinya tanpa berusaha

Motivasi adalah hal yang membuat kamu memulai. Kebiasaan adalah hal yang
membuat kamu tetap bertahan.
(Jim Ryun)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini karena orang-orang tidak menyadari betapa
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” (Thomas Alva
Edison)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Achmad Tahir

NIM : 130810101051

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Judul Skripsi : Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Parkir
Berlangganan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di
Kabupaten Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 27 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Achmad Tahir
NIM 130810101051



**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Achmad Tahir

NIM 130810101051

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Agus Luthfi, M.Si
Dosen Pembimbing II : Dr. Siswoyo Hari Santosa, M.Si

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi :Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Parkir Berlangganan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jember

Nama Mahasiswa : Achmad Tahir

NIM : 130810101051

Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.s Agus Luthfi M,Si
NIP. 19650221990021001

Dr. Siswoyo Hari Santosa, M.Si.
NIP. 196807151993031001

Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
BERLANGGANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Achmad Tahir
NIM : 130810101051
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal ;

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Teguh Hadi P, M.Si (.....)
NIP. 197002061994031002
2. Sekretaris : Dr. Riniati, MP (.....)
NIP. 1960064301986032001
3. Anggota : Dr. Sebastiana Viphindartin, S.E M.Kes. (.....)
NIP. 19641108 198902 2 001

FOTO

**4 x 6
cm**

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak.CA
NIP. 197107271995121001

*Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jember*

Achmad Tahir

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember

ABSTRAK

Saat ini kendaraan bermotor bukanlah barang mewah, rata-rata masyarakat memiliki kendaraan bermotor. Masyarakat membutuhkan lahan parkir untuk memarkir kendaraannya ketika sedang berpergian. Pemerintah Daerah telah membuat kebijakan tentang retribusi pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya dan membayar parkir dalam waktu satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi retribusi parkir berlangganan terhadap Pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember serat implementasinya pada tahun 2011-2015. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan data sekunder serta primer. Data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan Retribusi Parkir berlangganan dan Pendapatan Asli daerah Tahun 2011-2015 yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara langsung kepada beberapa pengguna dan petugas parkir berlangganan di salah satu kawasan parkir berlangganan di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil akhir menunjukkan efektivitas retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember dapat dikatakan sangat efektif. Kontribusi retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember dapat dikatakan cukup baik, dan implementasi retribusi parkir berlangganan dapat dikatakan kurang karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih terdapat petugas juru parkir yang menerima imbalan dan pengguna jasa parkir yang memberi imbalan.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, implementasi, retribusi parkir berlangganan

*Effectiveness and Contribution of Parking Parking Levy Subscription To Local
Original Income In Jember District*

Achmad Tahir

*Department of Economics and Development Studies, Fakultas of Economics and
Business, University of Jember.*

ABSTRACT

Currently motor vehicles are not luxury goods, the average society has a motor vehicle. People need parking space to park their vehicles while traveling. The local government has made a policy on the ruddling of a public roadside subscription parking service, which aims to make it easier for people to park their vehicles and pay for parking within a year. This study aims to determine the effectiveness and contribution of parking retribution subscription to the original Revenue in Jember District fiber implementation in 2011-2015. The type of this research is qualitative deskriptif and secondary and primary data. Secondary data in the form of target and realization of acceptance of Parking Retribution and Local Original Income Year 2011-2015 obtained from Regional Office of Revenue Office of Jember Regency. Primary data is the result of observation and direct interview to some of the users and parking officer of subscription in one of parking area of subscription in Jember Regency. Based on the final result shows the effectiveness of parking subscription rertibusi in Jember Regency can be said very effective. The contribution of subsidized parking fees in Jember Regency is quite good, and the imple- mentation of parking parking is less due to non-compliance with applicable regulations, there is still a parking officer who receives compensation and parking service users who provide imabalan.

Keywords: effectiveness, contribution, implementation, subscription parking levy

RINGKASAN

Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jember; Achmad Tahir, 130810101051; 2017; 57 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada, sehingga menjadi sumber pendapatan daerah tersebut. Pada otonomi daerah saat ini, kekuasaan dalam pengelolaan keuangan diberikan pada daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (UU No. 32,2004) (Irsandy et all, 2014) Menurut Ariun (1979 dalam Yuliantini:2012) Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada daerah tersebut. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.(Reza Arditia, 2013)

Dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap tahunnya dan juga saat ini Indonesia telah menjalankan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam membuat kebijakan yang menyangkut parkir. Peraturan daerah menyangkut parkir pun berbeda-beda tiap daerah. Kebijakan pemerintah mengenai parkir di suatu daerah telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari daerah itu sendiri. Dari kebijakan pemerintah yang mengatur berlangsungnya kegiatan parkir di suatu daerah maka pemerintah juga memiliki peraturan yang juga berkaitan dengan pendapatan jasa parkir. Tentunya pendapatan dari parkir ini tidaklah sedikit dan tentu berpengaruh pada pendapatan daerah ketika parkir ini dikelola oleh pemerintah. Dengan adanya UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka pemerintah daerah lebih bisa mengolah dan mengatur keuangan daerahnya masing-masing. Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah diasumsikan dapat mengontrol pelaksanaan parkir dan juga pendapatan dari parkirnya. Pendapatan dari sektor parkir diasumsikan bisa mengalami peningkatan di tiap tahunnya, mengingat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang semakin tahun semakin bertambah.(Martinus, 2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah serta implemntasi di Kabupaten Jember pada tahun 2011-2015.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Jember di kategorikan sangat efektif dengan rata-rata 100% dari tahun 2011-2015. Hasil tersebut menggambarkan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Hasil analisis kontribusi menunjukkan tingkat kontribusi retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember dapat dikatakan cukup baik, dengan rata-rata 35% dari tahun 2011-2015. Hasil analisis deskriptive menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rata-rata pengguna jasa parkir berlangganan masih memberikan uang kepada petugas parkir, sebaliknya terdapat beberapa petugas juru parkir yang sengaja mengikuti pengguna jasa parkir agar mereka diberi uang parkir

PRAKATA

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan YME atas berkat dan rahmatNya, karena tanpaNya tidak ada suatu hajatpun yang dapat terlaksana. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri dan Pengolahan di Kabupaten Jember Tahun 2001-2015”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari batuan berbagai pihak baik berupa motivasi, tenaga, pikiran, materi, nasehat, kritik maupun saran yang membangun. Oleh karena itu Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Bapak Drs. Agus Luthfi, M,Si selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Dr. Siswoyo Hari Santosa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan seksama dan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. CA_selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
6. Ibunda Rukayah dan Ayahanda Sugeng Suprpto, terima kasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, kasih sayang dan pengorbanan serta kerja keras selama ini.
7. Kakakku Eka Nely Ibiwati dan Nova Dwi Ristayanti yang telah memberikan dukungan dan semangat serta ketulusannya untuk selalu mendoakan.

8. Sahabat sekaligus Teman hidup Putri Adena Vanda yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan selama ini
9. Sahabat dari kecil hingga sekarang Taufiqurrahman yang telah memberi motivasi dan dukungan selama ini.
10. Dulur saudara tercinta Ferlianto Putro Dwi N., Galih Enggarini, Shenia Endika, Ayu Wiwin, Fariz Suryaputra, Fichi K, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi serta canda tawa yang selalu terukir.
11. Teman-teman seperjuangan konsentrasi Regional angkatan 2013 khususnya, dan jurusan IESP angkatan 2013 terima kasih untuk semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan.
12. Teman-Teman KKN UMD 04 Banyuputih tahun 2017 yang berasal dari beberapa fakultas. Mereka adalah Mirza, Edo, Harlendra, Galuh, Luthfi, Gamma, Heri, Farid, Fitri, Bibi, Samsuri, Tutut, kiki, dan Nana.
13. Keluarga Besar UKM KURUSETRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberi banyak ilmu yang tidak didapat di kelas kuliah dan memberi banyak pengalaman organisasi, sekaligus Keluarga Baru di Jember.
14. Teman seperjuangan BNI 46 KC Jember yang ditugaskan di KC Tulungagung Arief Anta A. , Aldi Dwi P. terimakasih telah menjadi teman yang baik serta saudara seperantauan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kekurangan dalam penyusunan skripsi maupun kesalahan dari pihak pribadi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Jember, 27 Agustus 2017

Achmad Tahir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Penerimaan Daerah	9

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.3 Retribusi Daerah	10
2.1.4 Teori Retribusi	13
2.1.5 Retribusi Parkir	14
2.1.6 Efektivitas Pajak	15
2.1.7 Kontribusi Pajak	17
2.1.8 Implementasi	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Konseptual	22
2.4 Hipotesis	23
BAB 3. METODE PENELITIAN	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.1.1 Jenis Penelitian	24
3.1.2 Waktu dan Tempat	24
3.1.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.1.4 Unit Analisis	25
3.2 Metode Pengumpulan Data	25
3.3 Metode Analisis Data.....	26
3.3.1 Metode Analisis Deskriptive.....	26
3.3.2 Metode Efektivitas.....	26
3.3.3 Analisis Kontribusi.....	27
3.3 Definisi Operasional	28
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	30
4.1.1 Kondisi dan Letak Geografis Kabupaten Jember	30
4.1.2 Data Penelitian	34

4.1.3 Analisis Efektivitas	35
4.1.4 Analisis Kontribusi	36
4.1.5 Analisis Deskriptive.....	37
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Efektivitas Retribusi Parkir Terhadap PAD	40
4.2.2 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD	41
4.2.3 Implementasi Retribusi Parkir.....	41
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia dari Tahun 2008-2007	3
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Jember Perkembangan Banyaknya Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan Berdasarkan Catatan Kepolisian Resort Jember 2008-2013	6
Tabel 2.1 Tabel Interpretasi Efektivitas	16
Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Efektivitas	27
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	28
Tabel 4.1 Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2015	34
Tabel 4.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2015	35
Tabel 4.3 Data Hasil Efektivitas Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Jember Tahun 2011-2015	36
Tabel 4.4 Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2105	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A.1 Data Tabel 3.5 Tabel interpretasi efektivitas	48
A.2 Tabel 3.6 klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	48
B.1 Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember	49
B.2. Lampiran Hasil Perhitungan Kontribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Jember	50
C.1Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona A Kabupaten Jember Hari Sabtu 8 Juli 2017	51
C.2 Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona B Kabupaten Jember Hari Minggu 9 Juli 2017	51
C.3 Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona C Kabupaten Jember Hari Sabtu 15 Juli 2017	52
C.4 Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona D Kabupaten Jember Hari Minggu 16 Juli 2017	52
C.5 Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona E Kabupaten Jember Hari Minggu 16 Juli 2017 t	53
D.1 Kuesioner Anatar Peneliti Dengan Pengguna dan Petugas Juru Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jember	53
D.2Foto-foto.....	54

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa wilayah. Setiap wilayah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahannya, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka diperlukan dana untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada, sehingga menjadi sumber pendapatan daerah tersebut. Pada otonomi daerah saat ini, kekuasaan dalam pengelolaan keuangan diberikan pada daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (UU No. 32,2004) (Irsandy et all, 2014) Menurut Ariun (1979 dalam Yuliantini:2012) Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada daerah tersebut. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.(Reza Arditia, 2013)

Sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, pinjaman daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Sigit, 2015) Menurut (Mahmudi, 2010:18) semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar direksi daerah tersebut untuk menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.(Tri Andi, 2015)

Efektifitas retribusi daerah sendiri merupakan penilai kinerja pemungutan retribusi daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran dengan melihat efektif atau tidak dari persentase penerimaan retribusi daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. (Irsandy et al, 2014). Kontribusi yaitu untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar hasilnya berarti besar pula peranan retribusi daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi 2010 : 145). (Feisly, 2013)

Bedasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Daerah juga berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi parkir termasuk bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah dimana penyelenggaraan tempat parkir berada di luar badan-badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Reza et al, 2014) Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa, “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Dalam retribusi jasa umum terdapat retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang memberikan kontribusi bagi PAD, untuk itu diperlukan upaya intensifikasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum guna optimalisasi PAD. Dengan melihat semakin bertambahnya volume kendaraan pemakai jalan maka diperlukan suatu tindakan dari pemerintah daerah untuk mengaturnya.

Kendaraan bermotor menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kebutuhan masyarakat. Penggunaan kendaraan bermotor secara pribadi biasanya menggunakan sepeda motor dan mobil, dengan demikian kebutuhan akan kepemilikan kendaraan bermotor menjadi tinggi.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia dari Tahun 2008-2012

Tahun	Mobil Penumpang (Ribu)	Bis (Ribu)	Truck	Sepeda Motor	Jumlah
2008	7.489.852	2.059.187	4.452.343	47.683.681	61.685.063
2009	7.910.407	2.160.973	4.452.343	52.767.093	67.336.644
2010	8.891.041	2.250.109	4.687.789	61.078.188	76.907.127
2011	9.548.866	2.254.406	4.958.738	68.839.341	85.601.351
2012	10.432.259	2.273.821	5.286.061	76.381.183	94.373.324

Sumber: BPS Indonesia, tahun 2013

Melihat jumlah kendaraan yang semakin tahun semakin meningkat, maka kondisi jalan raya akan semakin penuh, dimana jalan akan digunakan untuk kendaraan bergerak dan parkir. Setiap pengguna jalan membutuhkan parkir ketika mereka sampai di tujuan. Meningkatnya jumlah kendaraan di tiap tahunnya juga sebanding dengan jumlah kendaraan yang akan menggunakan jasa parkir. Jika kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum semakin meningkat maka jalan semakin banyak digunakan untuk parkir. Tiap pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir, keuntungan dari jasa parkir ini juga akan semakin meningkat seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. (Martinus, 2015) Dengan kata lain peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan berdampak bagi pemasukan pemerintah daerah.

Dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap tahunnya dan juga saat ini Indonesia telah menjalankan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam membuat kebijakan yang menyangkut parkir. Peraturan daerah menyangkut parkir pun berbeda-beda tiap daerah. Kebijakan pemerintah mengenai parkir di suatu daerah telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari daerah itu sendiri. Dari kebijakan pemerintah yang mengatur berlangsungnya kegiatan parkir di suatu daerah maka pemerintah juga memiliki peraturan yang juga berkaitan dengan pendapatan jasa parkir. Tentunya

pendapatan dari parkir ini tidaklah sedikit dan tentu berpengaruh pada pendapatan daerah ketika parkir ini dikelola oleh pemerintah. Dengan adanya UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka pemerintah daerah lebih bisa mengolah dan mengatur keuangan daerahnya masing-masing. Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah diasumsikan dapat mengontrol pelaksanaan parkir dan juga pendapatan dari parkirnya. Pendapatan dari sektor parkir diasumsikan bisa mengalami peningkatan di tiap tahunnya, mengingat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang semakin tahun semakin bertambah. (Martinus, 2015)

Kabupaten Jember merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, tentunya memerlukan dana yang begitu besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah. Sumber penerimaan pemerintah Kabupaten Jember berasal dari pengelolaan pendapatan asli daerah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentu tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan daerah lainnya. Kabupaten Jember mempunyai banyak potensi retribusi daerah yang masih perlu digali oleh pemerintah setempat. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber retribusi daerah yang berperan dalam peningkatan penerimaan retribusi bagi Kabupaten Jember. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2013 Bab 2 Pasal 2, sistem retribusi parkir di Kabupaten Jember terdapat dua sistem, yaitu sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar provinsi Jawa Timur dan sistem parkir berlangganan. Sistem ini dilakukan di tempat parkir umum yang dalam hal ini sistem parkirnya dikelola oleh pemerintah. Sistem parkir harian adalah retribusi parkir yang dipungut setiap 1 (satu) kali parkir sedangkan parkir berlangganan retribusi parkir yang dipungut setiap 1(satu) tahun. Kabupaten Jember merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotornya cukup besar.

Berikut tabel terkait perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Jember.

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Jember Perkembangan banyaknya Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan Berdasarkan Catatan Kepolisian Resort Jember 2008-2013.

Jenis kendaraan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sepeda Motor	38.345	41.361	419.275	464.362	302.375	413.461
Jeep	163	267	3.522	3.775	2.706	1.682
Sedan	231	472	6.683	7.092	3.432	256
Colt station	703	1.947	15.973	18.666	12.468	31.947
Truck	290	393	6.651	6.959	3.688	5.414
Colt Pick up	399	606	6.004	6.467	4.361	8.489
Bus	503	156	449	490	351	465
Ambulance	13	2	45	47	53	9
Roda 3	89	74	504	790	450	714
Jumlah	40.736	45.278	459.106	508.648	329.884	462.437

Sumber: http://jemberkab.bps.go.id/data/publikasi/publikasi_12/publikasi/index.html

Dengan melihat tingkat kepadatan kendaraan bermotor diatas, retribusi parkir akan berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian parkir berlangganan merupakan salah satu unit pendapatan untuk menopang pertumbuhan pendapatan asli daerah. Pemberlakuan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Jember sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang retribusi parkir yaitu parkir berlanggan adalah parkir yang dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan

tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan Perda Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir kendaraan ditetapkan sebagai berikut. Tarif retribusi parkir berlangganan roda dua (2) dan roda tiga (3) sebesar Rp. 20.000, roda empat (4) sebesar Rp. 40.000, roda enam (6) sebesar Rp. 50.000, pick up dan taxi argo sebesar Rp. 25.000. tarif retribusi parkir harian kendaraan luar Provinsi Jawa Timur roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp.1.000, roda 4 (empat) sebesar Rp.2.000, roda 6 (enam) sebesar Rp. 5.000.

Pelaksanaan parkir di dalam kota terbagi menjadi 5 zona. Zona A terdiri dari: Jalan Gajah Mada, Jalan Melati, Jalan Kenanga, dan Jalan Sultan Agung. Zona B terdiri dari : Jalan Diponegoro, Jalan Gatotot Subroto, Jalan Untung Suropati, dan Jalan PB Sudirman. Untuk zona C terdiri dari : Jalan A. Yani, Jalan Letjen Panjaitan, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Cokroaminoto. Zona D terdiri dari : Jalan Saman Hudi dan Jalan Gajah Mada selatan. Zona E meliputi : Jalan Jawa, Jalan Sumatera, dan Jalan Kalimantan (Tri Andi, 2015)

Sistem pembayaran parkir berlangganan cukup mudah dan cepat prosesnya masuk ke kas daerah. Pembayaran parkir berlangganan di Kabupaten Jember menggunakan sistem “notice” langsung pada STNK pemberian stiker parkir berlangganan ketika pengurusan pajak tahunan kendaraan bermotor oleh setiap wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Jember, stiker parkir berlangganan di letakkan pada STNK dan plat nomor kendaraan sebagai penanda bahwa orang tersebut telah membayar pajak parkir berlangganan. Kemudian SAMSAT Jember langsung menyetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim. Sedangkan parkir harian dimana pengguna jasa parkirnya adalah kendaraan bermotor dengan plat nomor di luar daerah Kabupaten Jember membayar kepetugas parkir. Petugas parkir langsung menyetor kepada petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan menyetorkan Ke Dinas Perhubungan. Uang parkir yang terkumpul di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember akan disetorkan langsung ke PEMDA Jember. Kendaraan berplat nomor luar Jember bisa menikmati parkir berlangganan ini, sehingga pada saat parkir kendaraan tidak terkena retribusi harian. Hal ini bisa dilakukan, apabila memenuhi ketentuan dari

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember dengan membeli stiker parkir berlangganan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga masyarakat yang memiliki plat nomor luar Jember bisa mendapatkan fasilitas parkir berlangganan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan.(

Berkaitan dengan masalah pelayanan perparkiran, masih banyak penanganan ketertiban petugas juru parkir yang melakukan kecurangan dalam mempermainkan tarif pada pembayar pajak parkir berlangganan di Kabupaten Jember. Adanya petugas juru parkir yang masih menerima dan meminta imbalan dari pengguna parkir berlangganan mengakibatkan kebocoran pendapatan retribusi parkir. Berdasarkan uraian di atas, lebih memfokuskan pada efektivitas, kontribusi dan implementasinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Jember, sehingga mengambil judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Parkir Berlangganan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah analisis ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember?
3. Bagaimana implementasi parkir berlangganan di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten jember
3. Untuk mengetahui implementasi parkir berlangganan di Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Pemerintah

Sebagai sumber referensi terhadap Pemerintah daerah dalam upaya-upaya dan kebijakan dalam pemungutan retribusi khususnya retribusi parkir. Dilihat dari seberapa besar pengaruh efektifitas dan kontribusi retribusi parkir berlangganan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD), sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

b. Civitas Akademika Universitas Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain baik mahasiswa Universitas Jember sendiri maupun mahasiswa lain yang ingin mengulas makalah tentang retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah dengan objek penelitian yang sama dan dapat menambah referensi yang ada dalam bidang pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

c. Penulis dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca hasil penelitian ini.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penerimaan Daerah

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 terdiri dari: pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (Sari, 2016)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber wilayahnya. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kelompok yang termasuk dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas (Sari, 2016)

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Irsandy et al, 2014). Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sheila, 2013)

Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah terlalu berat. Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan PAD dan ditentukan dalam Peraturan Daerah. Dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Sheila, 2013)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipasakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagi laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Lain-lain PAD yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran (Putriani, 2014)

2.1.3 Retribusi Daerah

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah juga berasal dari retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sheuila, 2013) Menurut Siahaan (2015:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepala negara karena adanya jasa tertntu yamnh diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan (Mega dan Inggriani, 2016)

Ciri-ciri Retribusi Daerah antara lain: dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum, dalam retribusi adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa tuimbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar, uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umu berkaitan dengan retribusi yang

bersangkutan, pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis. Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik, dan jasa masyarakat. Objek retribusi adalah berbagi jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, hanya jasa-jasa yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Subjek dari retribusi adalah orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah (Sheila, 2013)

Objek retribusi daerah terdiri dari: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi terdiri dari: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil. Perizinan tertentu yaitu berupa kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Putriani, 2014)

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Retribusi daerah dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatn sipil, retribusi pelayanan

pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan. Retribusi jasa usaha terdiri dari: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan diatas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi daerah. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman berakohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek (Putriani, 2014)

Menurut (Mardiasmo, 2009:17) terdapat prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi perizinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan (Putriani, 2014)

2.1.4 Teori Retribusi

Berawal dari pendapat James McMaster (1991), seorang pengajar ilmu ekonomi di sekolah Ilmu Administrasi Canberra, Australia, menyatakan retribusi didasari atas dua prinsip, yang pertama adalah “benefit principle”. Dibawah prinsip ini, mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah “ability-to-pay principle”, berdasarkan prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, maka semakin

rendah harga yang dikenakan dibanding dengan mereka yang tinggi penghasilannya (Levi Amos, 2008)

Ronald C. Fisher (1996), seorang ahli keuangan negara dan daerah menyatakan teori retribusi sebagai berikut “Secara teoritis, pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan. Pertama, retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga sesungguhnya, atas keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu insentif untuk pilihan efisien. Tujuan yang kedua pengenaan retribusi untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah” (Levi Amos, 2008)

2.1.5 Retribusi Parkir

Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi pendapatan asli daerah yaitu retribusi parkir. Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. (Sheila, 2013) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, retribusi parkir dibedakan menjadi dua, retribusi parkir berlangganan dan retribusi parkir harian. Retribusi parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Retribusi parkir harian adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus. Objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sheila, 2013) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum atau untuk tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Subjek retribusi parkir kendaraan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan ditempat lain yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Siahaan, setiap kabupaten atau kota memiliki tarif pajak parkir yang berbeda-beda. tarif pajak parkir paling tinggi ditetapkan sebesar 30% dan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pemberian tarif pajak parkir yang berbeda-beda dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 pasal 13 struktur besaran tarif Retribusi parkir 1 (satu) kendaraan ditetapkan sebagai berikut: Tarif retribusi parkir berlangganan untuk 1 tahun kendaraan bermotor roda 2 atau 3 sebesar Rp. 20.000, kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp. 40.000, kendaraan bermotor dengan roda 6/ lebih sebesar Rp. 50.000, kendaraan bermotor jenis Angkutan Barang roda 4 dan jenis taksi argo sebesar Rp. 25.000. Tarif retribusi parkir harian setiap satu kali parkir: kendaraan bermotor roda 2 dan 3 sebesar Rp. 500, kendaraan bermotor beroda 4/ lebih sebesar Rp. 1.000, kendaraan bermotor dengan roda 6/ lebih sebesar Rp. 2.500

2.1.6 Efektivitas Pajak

Efektifitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output (Djumhana, 2007:53) (Irsandy et al, 2014) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit. Efektivitas pendapatan asli daerah menurut (Halim, 2001) yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah.(Sari, 2016)

Analisis Efektifitas Pajak Daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004:135) (Irsandy et all, 2014) Efektivitas retribusi parkir menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi parkir yang telah ditetapkan.(Sari,2016)

Rumus Perhitungan Efektifitas Retribusi Parkir:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Sumber : (Irsandy et all, 2014)

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.(Sari, 2016) Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jember sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Interpretasi Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 40%	Sangat tidak efektif
40%-60%	Tidak efektif
60%-80%	Cukup efektif
80%-100%	Efektif
>100%	Sangat efektif

Sumber :Enggar, dkk: 2011(Sigit, 2015)

2.1.7 Kontribusi Pajak

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD, dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya maka peranan pajak daerah terhadap PAD semakin tinggi, jika hasil perbandingannya kecil maka peranan pajak daerah terhadap PAD kecil. Analisis kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. (Sari, 2016)

Untuk menghitung kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Sumber : (Irsandy et all,2014)

2.1.8 Implementasi

Pengertian implementasi adalah suatu proses yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional baik oleh pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2008:65) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pelaksanaan kebijakan merupakan proses untuk tercapainya suatu tujuan kebijaksanaan, karena penerapannya terhadap rakyat yang memiliki sifat berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula. (Dyah Ratna,

2010) Pelaksanaan kebijakan haruslah berhasil, namun yang terkandung dalam kebijaksanaan tersebut haruslah tercapai. Soenarko (2005:185) mengungkapkan pelaksanaan kebijakan dapat gagal, dikarenakan:

1. Teori yang menjadi dasar kebijaksanaan itu tidak tepat
2. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
3. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
4. Isi dari kebijaksanaan itu bersifat samar-samar
5. Ketidakpastian faktor intern dan faktor ekstern
6. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
7. Dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah teknis
8. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan menurut Soenarko (2005:186) yaitu:

1. Persetujuan, dukungan, dan kepercayaan rakyat
2. Isi dan tujuan kebijaksanaan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
3. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijaksanaan itu
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijaksanaan
6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijaksanaan

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Feisly Kesek (2013)	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	Metode Deskriptif Kualitatif	<p>1. Tahun 2009-2012 bervariasi, yaitu sangat efektif terjadi di tahun 2009 sebesar 117,36% dan tahun 2012 sebesar 155,80%, cukup efektif terjadi di tahun 2011 sebesar 89,23% dan kurang efektif terjadi di tahun 2010 sebesar 69,14%.</p> <p>2. Tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% yang berarti masih kurang. Meskipun demikian, secara presentasi masih sangat kecil kontribusinya terhadap PAD, namun secara nominal menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012. Masih terdapat beberapa tempat dan kawasan yang memerlukan lahan parkir serta fasilitas untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik sehingga hal itu dapat menjadi potensi-potensi yang baru untuk sektor perparkiran di Kota Mando dan menambah kontribusi</p>

				bagi PAD, seperti yang akan ada di Rumah Sakit Siloam, pembangunan Star Square Manado sebagai pusat perbelanjaan mall yang baru, Kawasan Boulevard.
2.	Nariana, Siti Khairiani, ratna Juwita	Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	Metode Kausalitas	Bedasarkan hasil perhitungan regresi linear sederhana dari regresi partial menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didasarkan pada t hitung sebesar 3,657 dengan nilai value sebesar 0,035 pada tingkat alfa 5%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palembang
3.	Martinus Richard Norin Reswa	Efektivitas Kebijakan parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan	Metode Kualitatif	1. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan telah berjalan secara efektif dan terlihat dari beberapa pencapaian indikator keefektivan, diantaranya: a. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yang jelas. b. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

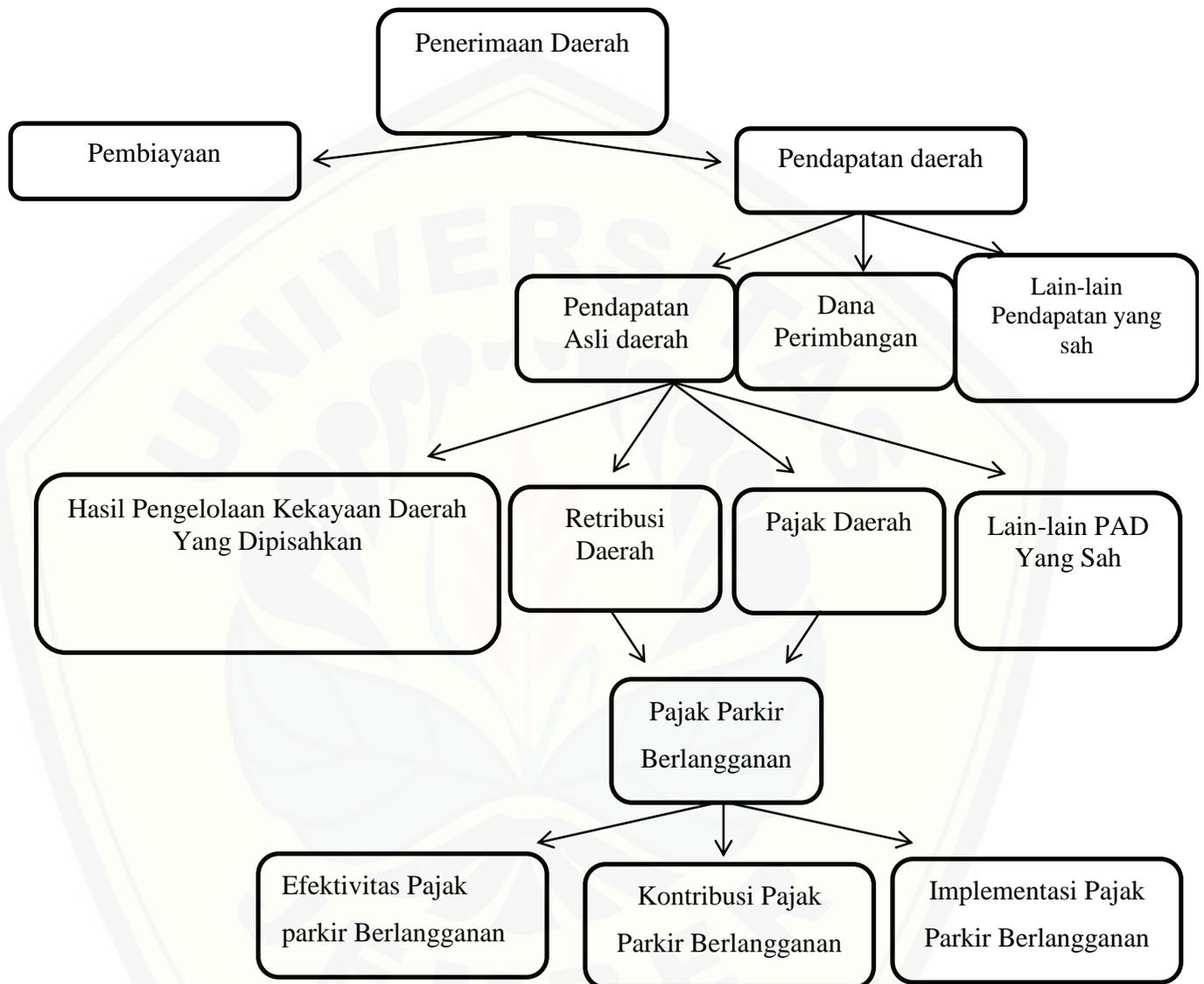
				<p>selaku organisasi palaksana kebijakan parkir berlangganan memiliki strategi dan inovasi.</p> <p>c. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan telah mampu menganalisis kebocoran pemasukan dari sektor parkir.</p> <p>d. Dinas Perhubungan telah bekerjasama dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan ini dengan SAMSAT.</p> <p>e. Dinas Perhubungan telah mempersiapkan anggota dan membuka lowongan untuk juru parkir.</p> <p>f. Dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan, sarana dan prasana juru parkir diperhatikan dengan baik.</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Jurnal dan Skripsi

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Waktu penelitian dalam rentang waktu 2011-2015
2. Objek penelitian yang diambil adalah Kabupaten Jember
3. Model penelitian ini merupakan hasil penggabungan dari beberapa model penelitian sebelumnya.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka pemikiran di atas menggambarkan konsep penelitian bahwa penerimaan daerah bersumber dari pembiayaan dan pendapatan daerah. Peneliti berfokus pada pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain penapatan yang sah. Peneliti berfokus pada Pendapatan Asli Daerah, PAD dibagi 4 Komponen yaitu Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah, dan Lain-lain PAD Yang sah. Peneliti lebih fokus dalam Retribusi dan Pajak daerah dengan mengambil Komponen Pajak Parkir Berlangganan. Terdapat tiga masalah yang diangkat peneliti mengenai Pajak Parkir Berlangganan yaitu untuk mengetahui Efektivitas, Kontribusi, dan Implementasi Pajak Parkir Berlangganan terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Jember.

2.4 Hipotesis

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

Ha1 :Pajak Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember memiliki Tingkat yang efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.

Ha2 : Pajak Parkir Berlangganan di Kabupaten jember memiliki Tingkat Kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabuoaten Jember

Ha3 : Implementasi Pajak Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabar dan berakhir dengan suatu teori dalam pelaksanaannya dengan melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian (Feisly, 2013)

Menurut (Sugiyono, 2014:14), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Feisly, 2013)

3.1.2 Waktu dan Tempat Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di Kabupaten Jember dengan rentang waktu penelitian 5 tahun dimulai dari 2011-2015. Waktu pengumpulan data dilakukan sekitar kurang lebih selama satu bulan. Dalam waktu tersebut penulis akan melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dan beberapa kawasan parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Jember.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik Kuncoro (2003:124) Data kuantitatif berupa Daftar target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2015 serta Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir berlangganan yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah Observasi dan wawancara kepada pengguna dan petugas parkir berlangganan di Kabupaten Jember.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan Retribusi Parkir berlangganan dan Pendapatan Asli daerah Tahun 2011-2015 yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara langsung kepada beberapa pengguna dan petugas parkir berlangganan di salah satu kawasan parkir berlangganan di Kabupaten Jember.

3.1.4 Unit analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah efektivitas dan kontribusi retribusi parkir berlangganan terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Jember dengan kurun waktu penelitian 2011-2015.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang akurat kebenarannya maka digunakan beberapa metode antara lain:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi mengenai data target dan realisasi penerimaan Retribusi Parkir berlangganan dan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Jember dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang terkait dengan penelitian.

2. Observasi

Peneliti mencoba untuk mengamati beberapa kawasan parkir berlangganan di Kabupaten Jember.

3. Wawancara

Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara kepada petugas Dinas Pendapatan daerah (DISPENDA) Kabupaten Jember, petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dan beberapa petugas serta pengguna parkir berlangganan di salah satu kawasan parkir berlangganan di Kabupaten Jember guna memperoleh informasi tambahan mengenai Pajak Parkir dan penerapannya serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Metode Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

3.3.2 Analisis Efektivitas

Analisis efektifitas retribusi daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. (Halim, 2004:135) (Irsandy et all, 2014)

Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Sumber : (Irsandy et all, 2014)

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Untuk menilai tingkat efektivitas retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup efektif
60 - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996(dalamDwirandra:2008)

3.3.3 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi retribusi daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi parkir terhadap retribusi daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi terhadap retribusi daerah, sedangkan analisis kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

khususnya retribusi parkir. (Irsandy et all, 2014) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember dapat digunakan rumus:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Sumber : (Irsandy et all,2014)

Untuk menilai kriteria kontribusi retribusi parkir dapat terlihat pada tabel.

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10 %- 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber:Tim Litbang Depadagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari: 2011)

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan agar variabel penelitian, baik variabel dependen ataupun variabel independen yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan secara maksimal tanpa terjadi pemahaman yang tidak tepat dan meluasnya cakupan permasalahan, maka terdapat batasan-batasan mengenai variabel-variabel yang digunakan yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah,

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Efektivitas Retribusi Parkir

Efektivitas Retribusi Parkir adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah khususnya retribusi parkir.

3. Kontribusi Retribusi Parkir

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah (retribusi parkir) memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD, dengan membandingkan penerimaan retribusi parkir periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu

4. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional baik oleh pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

BAB 5. PENUTUP

Dalam Bab 5 akan memaparkan dua bagian yaitu bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas, kontribusi dan implementasi retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu juga akan menguraikan saran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan mengenai retribusi parkir.

5.1 Kesimpulan

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir Kabupaten Jember pada tahun 2011-2015 dapat dikategorikan sangat efektif, karena persentasenya melebihi 100%. Tahun 2011 tingkat efektivitas mencapai 97% dapat dikatakan efektif, tahun 2012 dan 2013 adalah 103% dan 105% atau sangat efektif, tahun 2014 98% efektif dan tahun 2015 mencapai 101% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Secara keseluruhan tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Jember pada tahun 2011-2015 dapat dikategorikan cukup baik, karena rata-rata dari tahun 2011-2015 persentasenya mencapai 35%. Tahun 2011 tingkat kontribusi mencapai 39 % dapat dikatakan cukup baik. Tahun 2012 mencapai 37%, tahun 2013 mencapai 36%, tahun 2014 mencapai 32, dan tahun 2015 mencapai 31%.
3. Implementasi retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember dapat dikatakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rata-rata pengguna jasa parkir berlangganan masih memberi upah kepada petugas parkir, dan terdapat beberapa petugas parkir yang sengaja mengikuti pengguna jasa parkir supaya mereka memberikan upah kepada mereka.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian secara umum tingkat efektivitas retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember dikatakan sangat efektif, untuk kedepannya diharapkan dinas pendapatan yang bekerjasama dengan dinas perhubungan dapat meningkatkan atau minimal mempertahankan tingkat efektivitas retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Secara umum kontribusi retribusi parkir berlangganan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember dapat dikatakan cukup baik, diharapkan untuk periode tahun selanjutnya retribusi parkir berlangganan memberikan kontribusi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena dari tahun 2012-15 terjadi penurunan sedikit demi sedikit.
3. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember dapat dikatakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan untuk dinas perhubungan lebih memperketat lagi pengawasan terhadap petugas juru parkir agar tidak menerima atau meminta uang kepada pengguna jasa parkir berlangganan. Sosialisasi terhadap pengguna jasa parkir perlu ditingkatkan agar masyarakat tau tentang peraturan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember, dengan melakukan penyampaian tentang retribusi parkir berlangganan ketika masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir berlangganan di kantor samsat.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Data Keuangan Pemerintah (Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*. Jember : BPS Jember
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Data Keuangan Pemerintah (Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*. Jember : BPS Jember
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Data Keuangan Pemerintah (Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*. Jember : BPS Jember
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Data Keuangan Pemerintah (Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*. Jember : BPS Jember
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Data Keuangan Pemerintah (Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*. Jember : BPS Jember
- Dina Anggraeni. 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Dini Nurmayasari. 2010. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Dyah Ratna Susanti. 2010. *Impelmentasi Perda Kabupaten Jember Nomor 12 tahun 2008 Tentang Rertribusi Parkir*. Jember : Universitas Negeri Jember
- Feisly Kesek. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado
- Happy Akbar Pamungkas. 2010. *Optimalisasi Pendapatan Sektor Parkir Dalam Meningkatkan Peningkatan Asli Daerah*. Malang : Universitas Brawijaya
- Indra Riady. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, Devi Farah Azizah. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Malang : Universitas Brawijaya
- Jufrizen. 2013. *Analisis potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat - Pusat Perbelanjaan Kota Medan*. Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- Levi Amos Hasudungan Silalahi. 2008. *Potensi Retribusi Terminal Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah: Evaluasi Terhadap Kinerja Pemungutan Retribusi Terminal Di Kota Depok* : Universitas Indonesia
- Martinus Richard Norin Reswa. 2015. *Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan*. Surabaya : Universitas Airlangga
- Mega Ersita, Inggriani Elim. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Mochamad Najib. 2014. *Politisasi Parkir Berlangganan*. Surabaya : Univeristas Airlangga
- Nariana, Siti Khairani, Ratna Juwita. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang* : STIE MDP
- Nurhaidah. 2006. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bima*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2011 Tentang Pelayanan parkir Di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Randy J.R. Walakandou. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado
- Reza Arditia. 2013. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya
- Reza Fairuzabadi, Budi Gutami, Dwi Poernomo. 2014. *Peranan Pajak Parkir Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Penulisan Hukum*. Semarang : Universitas Diponegoro

- Reza Putriani. 2014. *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Sari Hayati. 2016. *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan*. Seruyan : Universitas Darwan Ali
- Sheila Ratna Dewi. 2013. *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Sigit Purwanto. 2015. *Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang*. Semarang : Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- Sri Handoko P. SE. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Pontianak : Universitas Tanjungpura
- Susi Susanti, Debby Ch. Rotinsulu, Steva Y.L. 2011. *Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado
- Tarida Elisa Butarbutar. 2014. *Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado
- Tri Andi Purwanto. 2015. *Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jember*. Jember : Universitas Negeri Jember
- Yulia Febrianti, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo. 2013. *Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan*. Malang: Universitas Brawijaya

Lampiran 1 :**Lampiran 1.1 Tabel Interpretasi Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup efektif
60 - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996(dalamDwirandra:2008)

Lampiran 1.2 Kalsifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10 %- 30%	Sedang
30,10 %- 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber:Tim Litbang Depadagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari: 2011)

Lampiran 2**Lampiran 2.1 Hasil perhitungan Efektivitas Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember**

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2011} &= \frac{7331.752.000}{7.586.210.000} \times 100\% \\ &= 97\% \end{aligned}$$

Penerimaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Jember tahun 2011 dikategorikan efektif.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{7908.822.000}{7.662.290.000} \times 100\% \\ &= 103\% \end{aligned}$$

Penerimaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Jember tahun 2012 dikategorikan sangat efektif.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{8.576.707.000}{8.136.000.000} \times 100\% \\ &= 105\% \end{aligned}$$

Penerimaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Jember tahun 2013 dikategorikan sangat efektif.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{9.024.768.000}{9.226.226.100} \times 100\% \\ &= 98\% \end{aligned}$$

Penerimaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Jember tahun 2014 dikategorikan efektif.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{9.740.043.000}{9.687.537.000} \times 100\% \\ &= 101\% \end{aligned}$$

Penerimaan retribusi parkir berlangganan Kabupaten Jember tahun 2015 dikategorikan sangat efektif.

Lampiran 3**Lampiran 3.1 Hasil perhitungan Kontribusi Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember**

$$\text{Tahun 2011} = \frac{7.331.752.000}{1.882.586.732.606,79} \times 100\%$$

$$= 39\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{7.908.822.000}{2.146.090.218.860,72} \times 100\%$$

$$= 37\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{8.576.707.000}{2.366.375.217.230,67} \times 100\%$$

$$= 36\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{9.024.768.000}{2.798.612.164.201,69} \times 100\%$$

$$= 32\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{9.740.043.000}{3.16.542.849.533,93} \times 100\%$$

$$= 31\%$$

Lampiran 4**Lampiran 4.1 Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona A Kabupaten jember Hari Sabtu 8 Juli 2017**

Zona A	Waktu	Yang bayar	Yang tidak membayar	Jumlah
Jalan Gajah Mada	10.00-12.00 WIB	19	7	26
Jalan Melati	12.30-14.30 WIB	23	2	25
Jalan Sultan Agung	14.00-16.00 WIB	28	6	34

Lampiran 4.2 Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona B Kabupaten jember Hari Minggu 9 Juli 2017

Zona B	Waktu	Yang bayar	Yang tidak membayar	Jumlah
Jalan PB Sudirman	18.00-20.00 WIB	20	2	22
Jalan Diponegoro	10.00-12.00 WIB	32	3	35
Jalan Untung Suropati	12.30-14.30 WIB	28	3	31

Lampiran 4.3 Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona C Kabupaten Jember Hari Sabtu 15 Juli 2017

Zona C	Waktu	Yang bayar	Yang tidak membayar	Jumlah
Jalan A Yani	08.00-10.00 WIB	24	7	31
Jalan Trunojoyo	10.30-12.30 WIB	21	3	24
Jalan letjen panjaitan	13.00-15.00 WIB	18	1	19

Lampiran 4.4 Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona D Kabupaten Jember Hari Minggu 16 Juli 2017

Zona D	Waktu	Yang bayar	Yang tidak membayar	Jumlah
Jalan Gajah Mada Selatan	08.00-10.00 WIB	18	4	22
Jalan Saman Hudi	10.30-12.30	15	3	18

Lampiran 4.5 Tabel Data Observasi Pelanggan Parkir Berlangganan Yang Membayar dan Tidak Zona E Kabupaten Jember Hari Minggu 16 Juli 2017

Zona E	Waktu	Yang bayar	Yang tidak membayar	Jumlah
Jalan Jawa	13.00-15.00 WIB	20	3	23
Jalan Kalimantan	15.15-17-15 WIB	14	2	16
Jalan Sumatera	18.00-20.00 WIB	43	8	51

Lampiran D.1 kuesioner antara peneliti dengan pengguna dan petugas juru parkir berlangganan di Kabupaten Jember

Petugas parkir:

1. Berapa gaji perbulan petugas juru parkir berlangganan?
2. Mengapa rata-rata petugas juru parkir menerima imbalan yang diberi oleh pengguna jasa parkir?
3. Apakah ada saran untuk kedepanya agar petugas juru parkir bisa menerapkan sesuai peraturan yang berlaku?

Pengguna jasa parkir:

1. Apakah saudara mengetahui tentang retribusi parkir berlangganan?
2. Mengapa rata-rata pengguna jasa parkir masih memberi imbalan kepada petugas jasa parkir?
3. Apakah saudara terasa terganggu dengan adanya petugas parkir yang mengikuti anda ketika hendak pergi dari tempat parkir?

4. Lampiran D2 foto-foto



JEMBER





JEMBER